

Menafsir Ulang Sejarah Perkembangan Kota Kendari: Implikasi Dari Kekacauan Sosial Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan¹

Oleh: La Ode Rabani²

Abstrak

Makalah ini akan menjelaskan fakta-fakta baru dalam menjelaskan perkembangan Kota Kendari. Kota Kendari adalah sebuah kota kecil di Sulawesi Tenggara yang terkait dengan peristiwa nasional seperti DI/TII. Oleh masyarakat lokal dinamakan dengan gerombolan, yang latar belakangnya diungkap oleh Barbara S Harvey (1987) karena ketidakmampuan negara mengakomodasi bekas pejuang kemerdekaan dalam struktur negara. Kota ini sejak tahun 1964 ditetapkan sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara. Penetapan kota Kendari menjadi ibukota propinsi sejauh ini selalu dijelaskan dalam konteks politik. Konteks sosial belum pernah hadir dalam ranah ilmu pengetahuan lokal dan nasional. Padahal, kebijakan penetapan sebuah ibukota selevel Propinsi, melibatkan negara melalui tangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Tuntutan otonomi dan kekacauan sosial pada masa awal kemerdekaan (1945-1950an) yang terjadi di hampir seluruh Sulawesi Selatan dan Tenggara berdasarkan realitas dalam arsip tahun 1950an, membawa implikasi sosial yang serius dan mendorong peningkatan jumlah penduduk kota Kendari yang bersumber dari para pengungsi. Penanganan pengungsi melahirkan intervensi pada pembukaan pemukiman baru dan tersedianya fasilitas standar perkotaan. Implikasi lainnya adalah tatanan administrasi kota lebih teratur, sehingga keteraturan itu menjadi salah satu stimulus penetapan kota Kendari sebagai Ibukota Propinsi. Jadi, makalah ini mengembangkan perspektif sebelumnya bahwa perkembangan Kota Kendari dipengaruhi oleh faktor politik, termasuk ketika kota Kendari dijadikan sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara.

Kata Kunci: *Kekacauan, Pengungsi, Masyarakat, Ruang, dan Perkembangan Kota Kendari.*

¹Makalah ini pernah dipresentasikan pada Seminar Nasional 71 Indonesia Merdeka “**Jaringan Kebangsaan Antar-Nusa**” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Sumatra Barat di Padang, 23-24 Agustus 2016. Topik ini merupakan subbagian kecil dari penelitian yang disiapkan untuk Disertasi penulis di Universitas Gadjah Mada. Beberapa data telah mengalami penambahan dan beberapa bagian telah direvisi.

²Mahasiswa Pprogram Doktor, Program Pascsarjana Universitas Gadjaha Mada, Yogyakarta.

A. Pengantar

Membaca Kawat Rahasia, Kepala Pemerintahan Negeri Laiwui Kendari, No. Pem 3/x/1/420, Pokok mengenai Pengungsian penduduk dari Daerah Lawui Selatan Roraya ke Barat dari Gerombolan, tertanggal, 23 November 1955, yang ditujukan Kepada Kepala Djawatan Sosial Popinsi di Makassar yang ditemukan penulis ketika melakukan penelitian Arsip di Makassar menyadarkan penulis bahwa relasi antara konflik (salah satu produknya pengungsi) dengan pengembangan kota relatif erat. Eratnya hubungan kota dengan pengungsi bisa dilihat dari sisi demografi (jumlah) yang berimplikasi pada tersedianya ruang untuk pengungsi di Kota Kendari, fasilitas pengungsi yang berimplikasi pada pembangunan fasilitas kota, dan sejenisnya.

Topik tentang kekacauan dan perkembangan kota sejauh pengetahuan penulis belum banyak mendapat perhatian. Peneliti lebih banyak melihat kekacauan pada aspek politiknya. Implikasi kekacauan pada perkembangan kota dan infrastrukturnya masih jauh dari kata “diperhatikan”, oleh peneliti sejarah Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran topik ini menjadi salah satu referensi bagi kajian mengenai topik yang sama di masa mendatang. Hal itu tidak lepas dari situasi Indonesia sebagai negara dengan wilayah geografis yang luas, multietnik, mengalami fase penjajahan, dan perjuangan untuk merdeka, dan mempertahankan kemerdekaannya. Selain itu, Indonesia juga telah mengalami fase konflik yang berkepanjangan seperti kekacauan sosial (gerombolan versi pemerintah) karena mengganggu keamanan dan kenyamanan penduduk di beberapa wilayah Indonesia.

Gangguan keamanan dan kenyamanan itu seperti PRRI/Permesta di Sumatra Barat, Republik Maluku Selatan, Pertempuran 10 November di Surabaya tahun 1945, Angkatan Perang Ratu Adil, Gerakan Andi Azis, Kartosuwirjo, dan DI/TII yang melanda hampir seluruh Indonesia. Tampak jelas bahwa gangguan atau kekacauan sosial ini memberi dampak pada hadirnya pengungsi dan berkontribusi pada perkembangan kota, minimal pada aspek demografi dan infrastruktur kota. Selain itu, aspek dari morfologi kota juga ikut berubah ketika pemerintah kota melalui kebijakannya membuka pemukiman baru untuk para pengungsi.

Dalam konteks itu, makalah ini akan melihat sejauh mana kekacauan sosial di Sulawesi Tenggara berimplikasi pada perkembangan kota dan dalam hal apa

kekacauan itu memberi kontribusi pada penjelasan baru mengenai perkembangan kota Kendari yang dijadikan sebagai ibukota propinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 1964, meskipun Kendari dalam arti yang resmi, tidak memiliki akar historis dan pengalaman yang memadai menjadi ibukota sepertihalnya kota Baubau di Sulawesi Tenggara.

B. Kajian Awal Tentang Sejarah Kota Kendari

Sejarah kota Kendari sejauh ini sudah diteliti oleh Anwar,³ Basrin Melamba,⁴ dan La Ode Rabani.⁵ Anwar mengemukakan bahwa lahirnya kota Kendari tidak lepas dari peran J.N Vosmaers yang menjadikan teluk Kendari sebagai pusat pemukiman Eropa, pos militer dan dagang pemerintah kolonial sejak 9 Mei tahun 1831. Oleh karena kajian Anwar lebih berfokus pada upaya menemukan sejarah hari lahir Kota Kendari dan ditindaklanjutinya tahun penemuan Kendari oleh J.N. Vosmaers sebagai hari lahir kota, maka penelitian Anwar tidak menghadirkan peran komunitas lokal sebagai bagian penting dalam konstruksi sejarah lahir dan berkembangnya Kota Kendari. Kerajaan Mekongga dan mungkin Laiwui yang lebih dulu mengorganisir orang-orang Bajau dan para pedagang Bugis sebagaimana yang dicatat oleh Vosmaers tidak mendapat penjelasan yang memadai, sehingga kajian tentang sejarah kota Kendari yang diteliti oleh Anwar Hafid dkk. memberi kesan pada sudut pandang kolonial sentris.

Karya Anwar dkk. tersebut ternyata menjadi kegelisahan peneliti sejarah lainnya, termasuk Basrin Melamba yang mencoba menghadirkan sebanyak mungkin bukti bahwa karya Anwar dkk. tidak memadai dari sisi penggunaan sumber lokal. Hal itu dari banyaknya aspek kajian (sosial, politik, dan ekonomi) dari kota Kendari dihadirkan dalam bukunya. Banyaknya aspek yang dikaji telah menjadi kelebihan

³ Anwar Hafid dkk., *Sejarah Kota Kendari* (Kendari: Kerjasama Pem. Kota Kendari dengan FKIP Unhalu, 2006).

⁴ Basrin Melamba, Abdul Azis Salahuddin, and La Janu, *Kota Lama Kota Baru Kendari, Kajian Sejarah Sosial, Politik, Dan Ekonomi* (Yogyakarta-Kendari: Teras bekerjasama dengan LAT dan Lembaga Pengembangan Pengkajian Sejarah dan Kebudayaan Sultra, 2011). Lihat juga; Basrin Melamba, "Proses Awal Persebaran Penduduk Kota Kendari," *Jurnal Ilmu Pengetahuan LIKPI KENDARI* 3, no. No. 1 (January 2006).

⁵ La Ode Rabani, "Kota-Kota Pantai Di Sulawesi Tenggara" (Gadjah Mada, 2003). Lihat juga La Ode Rabani, *Kota Kota Pantai Di Sulawesi Tenggara* (Yogyakarta: Ombak, 2010).

dan sekaligus kelemahan, karena tidak semua aspek politik diungkap. Judul bukunya Kota Lama Kota Baru Kendari, Kajian Sejarah Sosial, Politik, dan Ekonomi dari sisi informasi relatif memadai. Akan tetapi, terjadi tumpang tindih dalam hal kategorisasi sehingga isi buku banyak terjadi pengulangan. Buku ini hadir untuk melengkapi kajian Anwar Hafid dkk. yang ditandai oleh semakin banyaknya sumber-sumber kolonial yang digunakan sebagai justifikasi bahwa kota Kendari lahir dari hasil proses yang panjang dengan peran komunitas lokal di dalamnya.

Karya La Ode Rabani tentang Kota-Kota Pantai di Sulawesi Tenggara (Tesis 2003) dan salah satu kota yang diteliti adalah kota Kendari.⁶ Karya ini mungkin satu-satunya karya sejarah kota mengenai Kendari dan lahir bersamaan dengan menguatnya minat pada studi sejarah perkotaan. Penelitian ini juga menggunakan sumber yang hampir sama dengan dua kajian terdahulu dengan fokus pada awal pertumbuhan dan perkembangan kota Kendari. Dinamika masyarakat lokal (Bugis, Bajau, Buton), dan hadirnya kekuasaan dan kekuatan luar seperti Cina, Arab, dan Eropa ikut memberi warna Kendari sebagai kota yang sedang tumbuh. Kajian ini berhenti pada akhir masa kolonial Belanda, sehingga periode Jepang dan masa-masa awal kemerdekaan dan seterusnya tidak menjadi fokus kajian. Pada titik inilah, penelitian Basrin ikut melengkapi kajian La Ode Rabani, meskipun buku yang dihasilkan Basrin dkk. masih perlu disempurnakan mengingat tensi lahirnya karya dikesankan sebagai karya yang sempurna (lihat pengantar). Pada titik itulah, makalah ini hadir untuk mengisi ruang-ruang penelitian sejarah kota Kendari, meskipun hanya salah satu aspek dari perkembangan kota yang terjadi setelah kemerdekaan, yakni kekacauan politik dan implikasinya bagi perkembangan atau sejarah kota Kendari.

C. Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan: Kekacauan dan Perkembangan Kota Kendari

Secara teoritis, kekacauan yang disebabkan oleh suatu peristiwa politik berimplikasi pada politik juga seperti jatuhnya korban di kalangan sipil, penggunaan kekuatan militer melalui operasi pemulihan keamanan, dan sebagainya. Akan tetapi,

⁶ *Ibid.*

kekacauan sejauh ini tidak dilihat sebagai salah satu bagian dari sejarah yang ikut memberi sumbangan pada perkembangan atau kemunduran suatu kota.

Catatan sejarah kekacauan di Sulawesi Tenggara dan melanda Kendari hingga menampakkan sifat ke-kotaannya pada fase awal terjadi sejak abad XVII. Kendari sebagaimana catatan J.N. Vosmaers menemukan orang-orang Bugis bersama suku Bajau yang bermukim di teluk Kendari.⁷ Kuat dugaan bahwa mereka datang ke Kendari untuk mencari daerah pemukiman baru setelah terjadi kekacauan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Tensi politik yang tinggi antara kerajaan Gowa dan Bone di bawah Arung Pallaka serta keterlibatan VOC yang terjadi pada abad XVII,⁸ telah menempatkan teluk Kendari sebagai ruang aman untuk pemukiman. Sumber-sumber ekonomi baik yang berbasis di laut maupun di darat berupa tersedianya air untuk konsumsi dan bahan pangan ikut mendukung komunitas Bugis dan Bajau menetap di teluk Kendari. Pada fase ini, awal pertumbuhan teluk Kendari sebagai ruang pemukiman dan tumbuhnya kota sedang berlangsung. Pada saat yang sama aktivitas perdagangan (pertukaran) antara penduduk lokal (Laiwoei atau Kandai) dari suku Tolaki, Moronene, dan Mekongga dengan orang-orang Bajau, Bugis, Cina, dan Arab juga berlangsung. Aktivitas ini berlangsung hingga awal abad XIX hingga J.N Vosmaers melaporkan penemuannya mengenai teluk Kendari. Catatan Vosmaer telah menjadi bukti kuat bahwa masyarakat “kota” kendari di teluk kendari sudah heterogen dan telah melakukan aktivitas perdagangan. Aktivitas seperti itu menjadi salah satu ciri masyarakat kota.

Pada perkembangan selanjutnya, Kendari dijadikan sebagai pos militer dan ekonomi atas usul Vosmaer sejak awal abad XIX.⁹ Fungsi Kendari dan infrastruktur yang dibangun untuk mendukung realisasi Kendari sebagai pos militer pemerintah

⁷ J.N. Vosmaer, “Korte Beschrijving van Het Zuid-Oostelijk-Schiereiland van Celebes,” *Verhandelingen van Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten En Wetenschappen* 17 (1839).

⁸ Thomas Gibson, *Kekuasaan, Raja, Syekh, Dan Ambtenaar; Pengetahuan Simbolik Dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000* (Makassar: Ininnawa, 2009). Lihat juga; Pim Schoorl, *Excursies in Celebes: En Bundel Bijdragen Bij Het Afscheid van J.Noorduyn Als Directeuresecretaris van Het Koninklijk Instituut Voor Taal- Land- En Volkenkunde*, ed. Harry A. Poeze (Leiden: KITLV Press, 1991). Juga; Leonard Y. Andaya, *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17* (Makassar: Ininnawa, 2004).

⁹ Vosmaer, “Korte Beschrijving van Het Zuid-Oostelijk-Schiereiland van Celebes.”

kolonial dan menjadi pos perdagangan di sisi Barat Laut Banda ikut menunjang perkembangan Kendari sebagai Kota di teluk Kendari. Pendirian pos militer ini didasari oleh dua alasan, yakni mengontrol lalulintas perdagangan dan mengawasi upaya invasi kerajaan Ternate dan Banggai terhadap wilayah yang dikuasai Kesultanan Buton di sisi Barat Laut Banda. Perlindungan masyarakat lokal oleh pemerintah kolonial Belanda dilakukan juga di teluk Kendari.¹⁰ Fakta ini memberi makna bahwa Kendari secara tidak langsung telah dikondisikan sebagai ruang kota yang terkoneksi dengan masyarakat kota lainnya. Kondisi seperti itu terus berlangsung hingga awal abad XX dan Kendari benar-benar telah menampakan ruang kotanya, ketika berbagai etnis bermukim di Kendari dan dibangunnya pelabuhan Kendari sebagai pelabuhan yang disinggahi oleh KPM.¹¹ Infrastruktur Kota Kendari dimanfaatkan oleh orang-orang Jepang untuk mendukung misi pendudukan (Penjajahan) hingga masa-masa awal kemerdekaan Indonesia.

Setelah kemerdekaan, kota Kendari telah menjadi ruang penyelundupan kopra karena intervensi harga yang dilakukan Yayasan Kopra di Makassar terhadap penetapan harga kopra yang tidak adil. Gangguan terhadap perdagangan mendorong pemerintah kota melakukan pengawasan atas tidak stabilnya harga dan masuknya kopra di pelabuhan Kota Kendari.¹² Intervensi ini ikut memperlambat perdagangan kopra di pasar Kendari. Perahu layar yang memuat kopra dari Wawonii lebih memilih menjualnya secara ilegal di Selayar dan perairan Kepulauan Buton daripada masuk di pelabuhan Kendari dan Baubau yang harganya relatif murah. Kekacauan ini juga disebabkan oleh para pemilik modal yang lebih memilih mengapalkan kopra ke

¹⁰ Esther Velthoen, "Contested Coastlines: Diasporas, Trade and Colonial Expansion in Eastern Sulawesi 1680-1905" (Murdoch University, 2002). Lihat juga; Esther J. Velthoen, "Pirates in Periphery: Eastern Sulawesi 1905," in *Pirates, Ports, and Coasts in Asia, Historical and Contemporary Perspectives*, ed. John Kleinen and Manon Osseweijer (Singapore: ISEAS, 2010), 200–221.

¹¹ Djoko Surjo, "Pertumbuhan Kota-Kota Pantai Nusantara" (Seminar Masyarakat Sejarawan Indonesia, Ujung Pandang: MSI, 1988). Juga; Tim Bunnell, "City Network as Alternative Geographies of Southeast Asia," *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 1, no. (1) (January 2013): 27–43, doi:<http://dx.doi.org/10.1017/trn.2012.2>. Lihat juga La Ode Rabani, *Kota Kota Pantai Di Sulawesi Tenggara* (Yogyakarta: Ombak, 2010).

¹² Said Duke, "Pembentukan Propinsi Sulawesi Tenggara 1950-1978: Studi Konflik dan Integrasi" (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997).

Surabaya daripada membawanya ke Makassar karena harga kopra yang rendah di bawah kendali Yayasan Kopra Makassar. Selain itu, kopra dari Sulawesi Tenggara yang seharusnya masuk di pelabuhan kota Kendari untuk dikapalkan ke Makassar sangat kurang karena para pedagang lebih memilih menyelundupkannya ke Timor-Timur.

Pada tahun 1950an terjadi gangguan serius atas keamanan di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. Gangguan keamanan ini “masih” menjadi produk (anakan) dari revolusi fisik (1945-1949) dalam mempertahankan kemerdekaan. Gangguan yang terjadi di Sulawesi Selatan bersamaan dengan gangguan keamanan lainnya seperti di Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Maluku. Negara Indonesia yang masih muda dihadapkan pada sejumlah persoalan serius, terutama mengakomodasi warga negara yang sebelumnya berjuang untuk kemerdekaan dan mempertahankan Indonesia. Pada saat yang sama gejolak dalam kerangka pencarian identitas sebagai sebuah negara sedang pada titik ketidakseimbangan, sehingga gejolak keamanan dan gangguan sosial terjadi di berbagai daerah. Dalam kasus Sulawesi Selatan sebagaimana diungkapkan oleh Barbara S. Harvey bahwa pemberontakan setengah hati yang dipimpin Kahar Muzakar melalui semangat DI/TII tidak lepas dari tidak terakomodasinya sebagian tentara ke tubuh Angkatan Bersenjata Indonesia.¹³ Kekacauan di Sulawesi Selatan ini membawa dampak yang serius di Sulawesi Tenggara. Para pengikut Kahar Muzakar juga mengganggu ketentraman dan kenyamanan penduduk di hampir seluruh Sulawesi Tenggara. Sumber ekonomi dan sarana mobilitas para pengikut Kahar Muzakar berasal dari Sulawesi Tenggara. Masyarakat lokal mengenal pengikut Kahar Muzakar sebagai gerombolan. Bahan makanan dan uang dirampas dari masyarakat lokal. Kondisi inilah yang mendorong pengungsian besar-besaran masyarakat desa-desa di Sulawesi Tenggara ke kota Kendari yang saat itu menjadi basis militer dan pusat pertahanan keamanan.

¹³ Barbara S. Harvey, *Kahar Muzakar, Dari Tradisi Ke DI/TII* (Jakarta: Grafiti Press, 1987).

D. Yang Baru dari Sejarah Kota Kendari: Implikasi Kekacauan pada Perkembangan Kota

Di bawah ini saya mengutip utuh isi surat mengenai hubungan kekacauan politik dan perkembangan kota. Surat ini kini menjadi Arsip Militer yang tersimpan di Badan Arsip dan Perputakaan Makassar. Bunyi Arsip itu seperti di bawah ini.

“Sesuai pembicaraan kami (Muh. Mansjur, Kepala Pemerintah negeri laiwui) dengan sipil, militer dan polisi yang dihadiri oleh Andi Pengeran (residen Koordinator), Comandan Sektor, Singa, Wakil teritorium VII Kapten Sutowo dan saudara sediri pada 20 November 1955 di rumah kepala pemerintah negeri Kendari, dengan agenda mengenai pengungsian:

1. Kesimpulan: Kapten Makatang dg. Sibali mengusulkan abhwa dengan operansinya baru2 ini telah merampas 82 orang yang ditampung di kamp BPT Kendari di Tipulu. Jauh pengunsian ini adalah 120 km dengan menggunakan otto partikelir atas kebijaksanaan komandan Sektor Singa. Para pengungsi ini tidak mau kembali lagi dan mereka bersedia bermukim di sekitar teluk kendari. Beliau sebenarnya hendak mengungsikan 1500 orang tetapi apa daya, peralatan dan keperluan pengangkutan kurang atai tidak ada sama sekali. Beliau perlu dibantu jaminan2 dan para pengungsi itu sangat kurus dan lemah. Mereka berasal dari orang-orang tolaki, Moronen dan Bugis. Sekitar 2000 an lainnya masih ditangan gerombolan.

2. Berkaitan dengan itu, saya sangat memuji inisiatif kapten Makatang dg. Sibali dan Kapten Kahar serta Mayor Sastroatmodjo (dari brawijaya), maka perlu perhatian sebagai berikut yakni mengadakan pengungsian besar2an seperti yang terjadi pada tahun 1952/1953

a. Penduduk yang dirasa perlu diungsikan dari daerah gerombolan ialah sasaran I dan II

-Daerah kecamatan Laiwui Selatan: kampong Roraya, Mareo, Lanowulu, Motulo, Bou-bou Pundowo Atori. Pengungsi sebesar 1500 jiwa

- Dari daerah Ambekairi pernah diusulkan tahun 1954 namun gagal diungsikan ke Wawotobi. Perkiraan pengungsi sejumlah 1800 jiwa. Perundingan melibatkan Abdul Kadir Junus dengan Daeng Pawangkang pada tanggal 23 Maret 55 dan 15 April 1955.

- Perladangan dan persawahan yang mereka kerjakan sebelumnya telah bersedia ditinggalkan oleh para pengungsi.

b. 82 jiwa yang mengungsi ke Kendari ditempatkan di Andonohu, dan rencana tempat pengunsian lainnya ke arah Sampara sekitar 4 km).

untuk A2. Tetap sebagaimana Tobeu dan Sambaeni dekat dengan pengungsian Rahabangga bisa menampung 1800 jiwa.

Pengungsian dilakukan dengan bantuan oto-oto. Pengungsian yang melalui air menggunakan bamboo yang tersedia di sekitar lokasi.

Sebelum dilakukan pengungian telah dilakukan perbaikan jalan dan jembatan khususnya Roraya, Tinanggea, Palangga, kendari, Jembatan Abekairi.

Di Kendari diadakan bangsal-bangsal penampungan dan juga di Tobeu.

Dibentuk panitia pengungsian di kecamatan Kendari
Biaya yang diperlukan dari pemerintah 50.000 melalui kepala djawaan social.
Yang dibutuhkan, pakaian, beras, sarung untuk 2000 jiwa. Selain itu diperlukan bibit padi untuk perladangan dan bibit ketela dan patjul-patjul.”

Surat di atas telah membuka cara berpikir kita bagaimana kekacauan politik ikut berkontribusi sebagai penunjang perkembangan kota. Infrastruktur kota, fasilitas kota, dan penyediaan pemukiman baru di kota yang melibatkan pemangku kepentingan terutama militer. Tampak jelas bahwa perkembangan kota Kendari yang kemudian menjadi Ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara, salah satunya disumbang oleh kekacauan politik di Sulawesi (Tenggara). Kehadiran pengungsi di kota telah ikut memperluas ruang dan demografi kota. Lebih jauh dari itu, bahan makanan, sarana transportasi, dan berbagai produk untuk konsumsi di perkotaan turut hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Kendari. Dalam perspektif yang sama, sektor-sektor lain di kota Kendari juga ikut berkembang seperti sektor ekonomi dan masuknya masyarakat selain pengungsi (sebagai pegawai dan pedagang) ke kota Kendari tidak bisa dihindari. Pada titik inilah kota Kendari menampakan eksistensinya sebagai kota di mana militer telah menghadirkan keteraturan dan kekuatan. Dua konsep yang disebut terakhir telah membawa implikasi pada penetapan kota Kendari sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara.

E. Kesimpulan: Inspirasi dari Kajian Sejarah Kota Kendari

Kajian terhadap sejarah kota telah menampakan kompleksitasnya. Makalah ini telah melengkapi perspektif sebelumnya dan menemukan bahwa kekacauan atau konflik di kota lain berpengaruh dan dirasakan oleh lainnya. Kasus kota Kendari menjadi salah satu contoh bagaimana suatu kota salah satunya tumbuh karena gangguan keamanan yang ditandai oleh hadirnya pengungsi dan segala konsekuensinya. Kehadiran militer yang membawa keteraturan telah menjadi salah satu pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada tahun 1964 menetapkan kota Kendari sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara.

Daftar Pustaka

- Andaya, Leonard Y. *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17*. Makassar: Ininnawa, 2004.
- Bunnell, Tim. "City Network as Alternative Geographies of Southeast Asia." *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 1, no. (1) (January 2013)
- Duke, Said. "Pembentukan Propinsi Sulawesi Tenggara 1950-1978: Studi Konflik Dan Integrasi." *Thesis*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.
- Gibson, Thomas. *Kekuasaan, Raja, Syeikh, Dan Ambtenaar; Pengetahuan Simbolik Dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000*. Makassar: Ininnawa, 2009.
- Hafid dkk., Anwar. *Sejarah Kota Kendari*. Kendari: Kerjasama Pem. Kota Kendari dengan FKIP Unhalu, 2006.
- Harvey, Barbara S. *Kahar Muzakar, Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti Press, 1987.
- Melamba, Basrin. "Proses Awal Persebaran Penduduk Kota Kendari." *Jurnal Ilmu Pengetahuan LIKPI KEndari* 3, no. No. 1 (January 2006).
- Melamba, Basrin, Abdul Azis Salahuddin, and La Janu. *Kota Lama Kota Baru Kendari, Kajian Sejarah Sosial, Politik, Dan Ekonomi*. Yogyakarta-Kendari: Teras bekerjasama dengan LAT dan Lembaga Pengembangan Pengkajian Sejarah dan Kebudayaan Sultra, 2011.
- Rabani, La Ode. *Kota Kota Pantai di Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta: Ombak, 2010.
- . "Kota-Kota Pantai Di Sulawesi Tenggara." *Thesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2003.
- Schoorl, Pim. *Excursies in Celebes: En Bundel Bijdragen Bij Het Afscheid van J.Noorduyt Als Directeuresecretaris van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-Land- En Volkenkunde*. Edited by Harry A. Poeze. Leiden: KITLV Press, 1991.
- Surjo, Djoko. "Pertumbuhan Kota-Kota Pantai Nusantara." *Ujung Pandang: MSI*, 1988.
- Velthoen, Esther. "Contested Coastlines: Diasporas, Trade and Colonial Expansion in Eastern Sulawesi 1680-1905." Murdoch University, 2002.
- Velthoen, Esther J. "Pirates in Periphery: Eastern Sulawesi 1905." In *Pirates, Ports, and Coasts in Asia, Historical and Contemporary Perspectives*, edited by John Kleinen and Manon Osseweijer, 200–221. Singapore: ISEAS, 2010.
- Vosmaer, J.N. "Korte Beschrijving van Het Zuid-Oostelijk-Schiereiland van Celebes." *Verhandelingen van Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten En Wetenschappen* 17 (1839).